

Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Rapat Dewan Pengurus APEKSI di Solo, Dorong Penyesuaian Kebijakan TKD

SOLO – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri rangkaian kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Solo, Kamis (3/9/2026).

Salah satu agenda utama yang diikuti adalah Rapat Dewan Pengurus APEKSI yang digelar di House of Danar Hadi, Solo. Rapat tersebut dihadiri para wali kota dari berbagai daerah dengan karakteristik berbeda, mulai dari kota industri, kota pariwisata, hingga kota dengan tantangan pembangunan lainnya.

Soroti Ruang Fiskal dan Otonomi Daerah

Dalam rapat tersebut, Dewan Pengurus APEKSI menyampaikan sejumlah masukan strategis untuk memperkuat sinkronisasi antara program pemerintah pusat dengan program prioritas pemerintah kota.

Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah ruang fiskal dan kapasitas pemerintah kota dalam menjalankan otonomi daerah.

APEKSI mendorong adanya penyempurnaan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyesuaian tersebut diharapkan dapat lebih mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal, karakter wilayah, beban pelayanan, serta kebutuhan masing-masing daerah.

Fleksibilitas APBD dan Pembiayaan PPPK

Selain itu, APEKSI juga menyoroti pentingnya fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penataan

belanja pegawai, serta pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang perlu disesuaikan dengan kemampuan riil masing-masing daerah.

“Hal tersebut dinilai penting agar pemerintah kota tetap memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjaga kualitas pelayanan publik sekaligus merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” jelas Eva.

Sampaikan Aspirasi Daerah ke Pemerintah Pusat

Melalui forum APEKSI, pemerintah kota diharapkan dapat terus menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat.

Dengan begitu, kebijakan nasional dapat berjalan selaras dengan kondisi serta kemampuan masing-masing pemerintah kota.(nda)